

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangulangi Masalah Pengangguran Di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut:

1. Bursa Kerja di Kabupaten Timor Tengah Utara masih terdapat hambatan antara dinas sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pencari kerja. Bursa kerja bertujuan untuk mempertemukan antara pencari kerja dan perekrut tenaga kerja namun pada kenyataannya di Kabupaten Timor Tengah Utara bursa kerja dinilai belum efektif dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai bursa kerja hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang tenaga kerja dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terhadap masyarakat dan juga kurangnya perusahaan perekrut yang bekerja sama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara .
2. Pelatihan kerja yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Timor Tengah Utara oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi belum efektif dikarenakan masih kurangnya anggaran untuk melaksanakan pelatihan kerja sehingga pelatihan yang dapat dilakukan terus menerus terkadang harus dibatalkan dan menunggu anggaran yang tersedia baik itu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), bukan hanya kurangnya anggaran namun pihak Balai Latihan Kerja (BLK) juga mengalami kesulitan pada sarana dan prasana misalnya peralatan untuk pelatihan. Selain itu Pihak Balai latihan Kerja (BLK)

masih kekurangan tenaga teknis sebagai guru pelatih atau pengajar dan juga dilihat dari pihak masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara memang memiliki partisipasi yang tinggi atau ingin ikut serta dalam kegiatan pelatihan namun pelatihan dilakukan dengan jumlah kuota yang terbatas dan pelatihan kerja juga terbatas.

3. Perluasan kesempatan kerja Pada kenyataannya di Kabupaten Timor Tengah Utara masih mengalami keterlambatan dalam pembangunan atau kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah. Perluasan kesempatan kerja harusnya mempermudah para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan namun apa yang di harapkan oleh pemerintah daerah ternyata tidak sesuai dengan realita yang ada. Perluasan kesempatan kerja yang diadakan di Kabupaten Timor Tengah Utara dinilai belum efektif karena pemerintah hanya berfokus kepada pekerjaan sebagai imigran (CPMI) yang mengakibatkan kurangnya daya tarik masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara untuk bekerja dan menyebabkan pengangguran.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu meningkatkan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat mengenai bursa kerja agar muda dipahami dan masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai adanya bursa kerja yang memudahkan mereka dalam mencari informasi mengenai lowongan kerja.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu meningkatkan anggaran pelatihan, meningkatkan program pelatihan, menambakan tenaga teknis atau guru pelati dan menambakan jumlah kuota peserta pelatihan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu meningkatkan kerja sama dengan perusahaan baik di dalam daerah maupun di luar daerah sehingga dapat menciptakan lowongan pekerjaan yang nantinya merekrut para pencari kerja dan Pemerintah juga perlu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kegiatan pelatihan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja guna melati dan membina masyarakat sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia di daerah maupun luar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A Samuelson. Paul dan William D Nordhaus. (2004). *Pengantar Teori Ekonomi edisi II*. Jakarta: Erlangga.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarata: Kencana Prenanda Media Group.
- Cohen Bruce J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cita.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Domai, Tjahjulin. 2010. *Manajemen Keuangan Publik*. Cetakan Pe. diedit oleh UB Press. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mankiw N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mankiw, N, Gregory, dkk. 2012, *Pengantar ekonomi makro*. Jakarta: salemba empat
- Nawi, Rusdin. 2017. *Perilaku Kebijakan Organisasi*. Makassar: CV Sah Media.
- Nurul Zuriyah, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Nyoman, Sumaryadi, I. (2010), *Sosiologi Pemerintahan; Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya)*. Yogyakarta: Zanafa Publizing.
- Riant Nugroho, 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Robbins, Stephen P. (2006). *Perilaku Organisasi*. Edisi kesepuluh. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Rusdin Nawi. (2017). *Perilaku Kebijakan Organisasi*, Bandung: Eksis Media. Grafisindo.

- Sanapiah Faisal 2001. *Format-Format Penelitian Sosial, cet kw-5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sarundajang, 2005. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Subarsono, A. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar Jakarta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. ALFABET
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. cet ke-12*. Bandung: Alpha Beta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Alfabeta Bandung
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan paraktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Cetakan ke. diedit oleh Aep Gunarsa. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sukirno. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2000). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Franita, R., Harahap, A. F. D., & Sukriah, Y. (2019). Analisa pengangguran di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 88-91.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. *Perspektif: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201-208.
- Junaidi, J., & Zulgani, Z. (2011). Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 3, 27-33.
- Muslim, M. R. (2014). Pengangguran terbuka dan determinannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(2), 171-181.
- Nurkholis. 2019. “Dampak pandemi novel-corona virus disiasa (covid-19) terhadap psikologi dan pendidikan serta kebijakan pemerintah”. *Jurnal Pgsd*, 6 (1), 41

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 pasal 3 tentang Prinsip dasar pelatihan kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 Perluasan Kesempatan Kerja

Internet

- Rabbani, Aletheia. 2017. “Peranan Sosial (Social Role)”. <https://www.sosiologi79.com/2017/09/peranan-sosial-social-role.html#>. Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2022. Waktu pukul 19:35 WITA
- Widyananda, Rakha Fahreza. 2020. “10 Penyebab Pengangguran di Indonesia dan Alasannya”. <https://m.merdeka.com/jatim/10-penyebab-pengangguran-di-indonesia-dan-alasannya-klm.html?page=10>. Diakses pada 06 April 2022. Waktu pukul 20:00 WITA